	Penilaian						
A.	PRO	SES	(60)				
	I.	MA	NA	JEMEN PERUBAHAN (5)	5.00		
		1	Tir	n Reformasi Birokrasi (1)	0.50		
			a.	Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja telah dibentuk			
			b.	Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi			
			C.	Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti			
		2	Ro	ad Map Reformasi Birokrasi (1)	0.50		
			a.	Road Map/Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun dan diformalkan			
			e.	Telah terdapat sosialisasi/internalisasi Road Map/Rencana Kerja Reformasi Birokrasi unit kerja kepada anggota organisasi			

		_	_	T	
			g.	1	
				selaras dengan Road Map	
		3	Pe	mantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi (2)	1.00
			d.	Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai	
				dengan ketentuan yang berlaku	
			f.	Parian para access members members access	
				pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai	
				PMPRB instansi?	
Щ		_	_		
			g.		
				dikomunikasikan dan dilaksanakan	
			<u> </u>		
			h.		
				melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan	
				rencana kerja.	
		4	Pe	rubahan pola pikir dan budaya kinerja (1)	0.50
			a.	Terdapat keterlibatan pimpinan	
				tertinggi/pimpinan unit kerja secara aktif dan	
				berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi	
				birokrasi	
		L			
			c.	Terdapat upaya untuk menggerakkan	
				organisasi/unit kerja dalam melakukan perubahan	
				melalui pembentukan agent of change ataupun	
				role model	
	II.	PEN		AAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (5)	5.00
		1	Ha	rmonisasi (2,5)	1.25
				-	

		a.	Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron yang akan direvisi/dihapus	
			Telah dilakukan revisi peraturan perundang- undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron	
	2	ı	tem pengendalian dalam penyusunan peraturan rundang-undangan (2,5)	2.50
III.	PEN	IAT	AAN DAN PENGUATAN ORGANISASI (6)	6.00
	1.	Eva	aluasi (3)	1.50
		f.	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi/unit kerja dengan kinerja yang akan dihasilkan	
		k.	Hasil assesment telah direviu oleh unit/bagian organisasi	
	2.	Pe	nataan (3)	3.00
IV.	PEN	IAT	AAN TATALAKSANA (5)	5.00
	1	ı	oses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) giatan utama (1,5)	0.625
		b.	Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP)	
		c.	Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan	
		d.	Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi	
	2	E-C	Government (2)	0.75

				T	
			c.	Sudah dilakukan pengembangan e-government	
				untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada	
				masyarakat (misal: website untuk penyediaan	
				informasi kepada masyarakat, sistem pengaduan)	
			d.	Sudah dilakukan pengembangan e-government	
				untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada	
				masyarakat dalam tingkatan transaksional	
				(masyarakat dapat mengajukan perijinan melalui	
				website, melakukan pembayaran, dll)	
		3	Ke	terbukaan Informasi Publik (1,5)	0.625
			b.	Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik	
			C.	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan	
				kebijakan keterbukaan informasi publik	
			1/	althou Dougo Lolo vo Austra	4.00
		4		alitas Pengelolaan Arsip	1.00
	V.	-		TAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)	15.00
		1	ı	rencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan	0.50
				butuhan organisasi (1)	
			a.	_ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
				dilakukan	
		1			
			<u></u>	Dowbitungon kohutuban garawai talah dilalud	
			b.	Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan	
			b.	Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan	
			b.	Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan	
				Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah	
				Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kebutuhan unit kerja dan selaras dengan	
				Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah	
				Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kebutuhan unit kerja dan selaras dengan	
			e.	Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kebutuhan unit kerja dan selaras dengan kinerja utama	
			e.	Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kebutuhan unit kerja dan selaras dengan kinerja utama  Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan	
			e.	Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kebutuhan unit kerja dan selaras dengan kinerja utama	
		2	e.	Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kebutuhan unit kerja dan selaras dengan kinerja utama  Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja  poses penerimaan pegawai transparan, objektif,	2.00
		2	e.	Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kebutuhan unit kerja dan selaras dengan kinerja utama  Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja  poses penerimaan pegawai transparan, objektif, untabel dan bebas KKN (2)	2.00
			e.  Pro aki	Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kebutuhan unit kerja dan selaras dengan kinerja utama  Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja  oses penerimaan pegawai transparan, objektif, untabel dan bebas KKN (2) ngembangan pegawai berbasis kompetensi (1)	
			e.  Pro aki	Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kebutuhan unit kerja dan selaras dengan kinerja utama  Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja  oses penerimaan pegawai transparan, objektif, untabel dan bebas KKN (2) ngembangan pegawai berbasis kompetensi (1)  Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan	
			e.  Pro aki	Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kebutuhan unit kerja dan selaras dengan kinerja utama  Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja  oses penerimaan pegawai transparan, objektif, untabel dan bebas KKN (2) ngembangan pegawai berbasis kompetensi (1)	
			e.  Pro aki	Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kebutuhan unit kerja dan selaras dengan kinerja utama  Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja  oses penerimaan pegawai transparan, objektif, untabel dan bebas KKN (2) ngembangan pegawai berbasis kompetensi (1)  Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan	

		e.	Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis	
		.	kompetensi sesuai dengan rencana dan	
			kebutuhan pengembangan kompetensi	
	4	Pro	omosi jabatan dilakukan secara terbuka (6)	6.00
	5	Pe	netapan kinerja individu (2)	1.00
		a.	Penerapan Penetapan kinerja individu	
		  -	Toudonat nonlinear linearie individuose e terro	
		b.	Terdapat penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	
			Letigali killerja Organisasi	
		c.	Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian	
		۲.	dengan indikator kinerja individu level diatasnya	
			a o o o o o o o o o o o o o o o o o o o	
		d.	Pengukuran kinerja individu dilakukan secara	
		".	periodik	
			Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas	
		.	pencapaian kinerja individu.	
		f.	Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan	
			dasar untuk pengembangan karir	
			individu/pemberian reward and punishment	
			lainnya	
	6		negakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku	0.50
		pe	gawai (1)	

		b.	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan  Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan	
		0.	aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi	
	7	Pe	laksanaan evaluasi jabatan (1)	0.50
		d.	Unit kerja telah mengimplementasikan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	
		e.	Unit kerja telah melaksanakan evaluasi jabatan berdasarkan SKJ	
	8.	Sis	tem Informasi Kepegawaian (1)	0.50
		b.	Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai	
VI.	PEN		JATAN AKUNTABILITAS (6)	6.00
	1	Ke	terlibatan pimpinan (2)	1.00
		a.	Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra	
		b.	Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja	
		C.	Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	
		d.	Pimpinan unit kerja telah memahami kinerja yang harus dicapai dalam jangka menengah	

		e.	Pimpinan unit kerja memahami kinerja yang diperjanjikan di setiap tahun	
		f.	Pimpinan unit kerja memantau pencapaian kinerja secara berkala	
	2	Pe	 ngelolaan Akuntabilitas Kinerja (4)	2.00
		a.	Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas	
			SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	
		e.	Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala	
		g.	Unit kerja telah memanfaatkan sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik	
VII.	PEN	IGL	JATAN PENGAWASAN (12)	12.00
VII.	PEN 1	_	JATAN PENGAWASAN (12) atifikasi (1,5)	12.00 0.75
VII.		Gr	• •	
VII.		Gr	atifikasi (1,5)	
VII.		Gr b.	Telah dilakukan <i>public campaign</i>	
VII.		Gr b.	Telah dilakukan public campaign  Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan  Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi  Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti	
VII.		b.	Telah dilakukan <i>public campaign</i> Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan  Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi  Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah	
VII.		b. c. d.	Telah dilakukan public campaign  Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan  Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi  Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti  Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat	
VII.		b. c. d.	Telah dilakukan public campaign  Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan  Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi  Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti  Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	
VII.		b. c. d.	Telah dilakukan public campaign  Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan  Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi  Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti  Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)  a. Jumlah yang harus melaporkan	
VII.		b. c. d.	Telah dilakukan public campaign  Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan  Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi  Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti  Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)  a. Jumlah yang harus melaporkan  - Kepala Daerah/Menteri/ Kepala Lembaga	
VII.		b. c. d.	Telah dilakukan public campaign  Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan  Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi  Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti  Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)  a. Jumlah yang harus melaporkan  - Kepala Daerah/Menteri/ Kepala Lembaga  - Eselon I/II	
VII.		b. c. d.	Telah dilakukan public campaign  Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan  Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi  Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti  Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)  a. Jumlah yang harus melaporkan  - Kepala Daerah/Menteri/ Kepala Lembaga  - Eselon I/II  - Lainnya	
VII.		b. c. d. e. f.	Telah dilakukan public campaign  Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)  a. Jumlah yang harus melaporkan - Kepala Daerah/Menteri/ Kepala Lembaga - Eselon I/II - Lainnya b. Jumlah yang sudah melaporkan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur	
VII.		b. c. d. e. f.	Telah dilakukan public campaign  Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)  a. Jumlah yang harus melaporkan - Kepala Daerah/Menteri/ Kepala Lembaga - Eselon I/II - Lainnya b. Jumlah yang sudah melaporkan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	

		Ι	Lumbels Feelen NV	I
			- Jumlah Eselon IV	
			- Jumlah Fungsional Golongan IV	
	_		b. Jumlah yang sudah melaporkan	_
	2	Pe	nerapan SPIP (1,5)	0.75
		b.	Telah dibangun lingkungan pengendalian	
		c.	Telah dilakukan penilaian risiko atas organisasi	
		d.	Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	
		e.	SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	
		f.	Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern	
		I.	Unit kerja telah melakukan evaluasi atas Penerapan SPI	
	3	Pe	ngaduan Masyarakat (2)	1.00
		b.	Penanganan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	
		c.	Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	
		d.	Penanganan Pengaduan Masyarakat	
			a. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti     b. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang	
			diproses  c. Jumlah pengaduan masyarakat yang selasai	
			ditindaklanjuti	

			e.	Telah dilakukan evaluasi atas penanganan	
				pengaduan masyarakat	
			_		
			t.	Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan	
		_		masyarakat telah ditindaklanjuti	
		4	WI	histle-Blowing System (1,5)	0.75
			b.	Whistle Blowing System telah disosialisasikan	
		_	_		
		5	_	nanganan Benturan Kepentingan (1,5)	0.75
			b.	1 - 1 6 - 1 - 1 - 1	
				disosialisasikan	
			-		
			c.	Penanganan Benturan Kepentingan telah	
				diimplementasikan	
			la.	Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan	
				Benturan Kepentingan	
				Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan	
			١٠.	Kepentingan telah ditindaklanjuti	
				Kepentingan telah ditindaklanjuti	
		6	Pe	mbangunan Zona Integritas (2,5)	1.25
			-	Telah dilakukan pembangunan zona integritas	1.23
			۲.	Telah dilakukan pembangunan zona integritas	
		7	Ар	arat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (1,5)	1.50
	VIII.	PEN	VIN	GKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (6)	6.00
		1	_	andar Pelayanan (1)	0.50
		-		Terdapat kebijakan standar pelayanan	0.00
			a.	Teruapat kebijakan stanuar pelayanan	
			b.	Standar pelayanan telah dimaklumatkan	
I				1	I

		c.	Telah terdapat sistem <i>punishment</i> (sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	
		d.	Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	
		e.	Terdapat inovasi pelayanan	
	3	Pe	 ngelolaan Pengaduan (1,5)	0.00
		a.	Terdapat media pengaduan pelayanan	0.50
		٦.		
		b.	Terdapat SOP pengaduan pelayanan	

		d.	Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan  Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan / masukan	
	4	Pe	nilaian kepuasan terhadap pelayanan (1,5)	0.00
		a.	Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	
		b.	Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	
		c.	Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat	
	5	Pe	manfaatan Teknologi Informasi (1)	0.50
		a.	Telah memiliki rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan	
		b.	Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	
		C.	Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus	
			TOTAL PENGUNGKIT	

Penjelasan	Bobot
	0.50
a. Telah dibentuk penanggung jawab Reformasi Birokrasi dengan ketetapan formal b. Telah dibentuk penanggung jawab Reformasi Birokrasi namun tanpa ketetapan formal c. Belum terdapat penanggung jawab Reformasi Birokrasi	
a. Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja b. Sebagian besar tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja c. Sebagian kecil tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja d. Seluruh tugas belum dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja	
a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti d. Seluruh rencana kerja belum dimonitoring dan di evaluasi	
	0.50
Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun dan diformalkan	
a. Seluruh anggota unit kerja telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja b. Sebagian besar anggota unit kerja telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja c. Sebagian kecil anggota unit kerja telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja d. Seluruh anggota unit kerja belum mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja	

a. Rencana Kerja telah menyajikan prioritas perbaikan, target waktu, penanggungjawab, dan telah	
diformalkan serta <b>telah selaras dengan Road Map</b> b. Rencana Kerja telah menyajikan prioritas perbaikan, target waktu, penanggungjawab, dan telah	
diformalkan, namun belum selaras dengan Road Map	
c. Rencana Kerja belum menyajikan prioritas perbaikan, target waktu, dan penanggungjawab	
	1.00
a. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB dan	
yang bersangkutan terlibat sepenuhnya sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB.	
b. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi	
partisipasinya tidak meliputi seluruh proses PMPRB.	
c. Terdapat penetapan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi fungsi asesor dari unit tersebut dilakukan oleh pegawai lain	
d. Partisipasi pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB belum ada.	
a. Mayoritas koordinator assessor mencapai konsensus dan seluruh kriteria dibahas	
b. Tidak seluruh koordinator assessor mencapai konsensus dan/atau tidak seluruh kriteria	
dibahas;	
c. Belum ada konsensus yang dicapai oleh para koordinator assessor	
a. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) yang telah dikomunikasikan dan dilaksanakan	
b. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) namun belum dikomunikasikan dan	
dilaksanakan	
c. Belum terdapat Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL)	
a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti	
b. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti	
c. Sebagian kecil rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah	
ditindaklanjuti	
d. Seluruh rencana kerja belum dimonitoring dan di evaluasi	
	0.50
a. seluruh jajaran pimpinan unit terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan	
Reformasi Birokrasi	
b. sebagian besar pimpinan unit terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan	
Reformasi Birokrasi	
c. sebagian kecil pimpinan unit terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan	
Reformasi Birokrasi d. Seluruh jajaran pimpinan unit belum terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan	
Reformasi Birokrasi	
a. Telah terdapat Agent of Change yang dibentuk secara formal dan telah memberikan kontribusi	
perubahan	
terhadap unit kerja	
b. Telah terdapat Agent of Change yang dibentuk secara formal namun belum memberikan	
kontribusi perubahan	
terhadap unit kerja	
c. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change namun secara formal belum dilakukan	
d. Belum ada upaya untuk membentuk Agent of Change	
	4.65
	1.25

	0.75
operasional	
SOP d. Belum ada evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas peta proses bisnis dan prosedur	
c. Terdapat evaluasi namun belum menganalisis efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan	
namun belum seluruh hasilnya ditindaklanjuti	
b. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala	
dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti	
a. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala	
d. Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) belum diterapkan	
c. Sebagian kecil Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan	
<ul><li>a. Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan</li><li>b. Sebagian besar Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan</li></ul>	
a Calumuh Dragadur anarasianal tatar (COD) talah ditarasikan	
d. Seluruh peta proses bisnis belum dijabarkan dalam SOP	
c. Sebagian kecil peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP	
b. Sebagian besar peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP	
a. Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP	
	0.023
	0.625
Ya/Tidak	
akan dihasilkan unit kerja	
c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang	
akan dihasilkan sebagian fungsi unit kerja	
akan dihasilkan seluruh fungsi unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang	
a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang	
	1.50
sinkron	
dilakukan, namun belum selesai c. Belum dilakukan upaya revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak	
b. Upaya revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron telah	
dilakukan, atau tidak ditemukan adanya peraturan perundangan-undangan yang tidak harmonis	
a. Revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron telah selesai	
undangan nebijanan yang anan unevisiyumapus	
c. Belum dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang- undangan/kebijakan yang akan direvisi/dihapus	
undangan/kebijakan yang akan dirivu/dihapus	
b. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap sebagian peraturan perundang-	
undangan/kebijakan yang akan diriviu/dihapus	
a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-	

a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi	
b. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government namun belum terintegrasi	
c. Sudah dilakukan pengembangan e-government namun belum dilakukan implementasi	
d. Belum ada pengembangan dan implemetasi e-government	
a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi	
b. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government namun belum terintegrasi	
c. Sudah dilakukan pengembangan e-government namun belum dilakukan implementasi	
d. Belum ada pengembangan dan implemetasi e-government	
	0.625
a. Seluruh informasi publik telah dapat diakses	
b. Sebagian besar informasi publik telah dapat diakses	
c. Sebagian kecil informasi publik telah dapat diakses	
d. Seluruh informasi publik belum dapat diakses	
a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan secara	
berkala	
b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan tidak	
berkala	
c. Belum ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	
	0.50
a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada seluruh jabatan	
b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada sebagian besar jabatan	
c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada sebagian kecil jabatan	
por Amanolo japatan admininio beban kenja telah anakakan kepada sebagian kecil japatan	
d. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan	
d. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan	
d. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan  a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada seluruh unit organisasi	
d. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan  a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada seluruh unit organisasi  b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada sebagian besar unit organisasi	
d. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan  a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada seluruh unit organisasi  b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada sebagian besar unit organisasi  c. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada sebagian kecil unit organisasi	
d. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan  a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada seluruh unit organisasi  b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada sebagian besar unit organisasi  c. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada sebagian kecil unit organisasi  d. Perhitungan kebutuhan pegawai belum dilakukan	
d. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan  a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada seluruh unit organisasi  b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada sebagian besar unit organisasi  c. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada sebagian kecil unit organisasi  d. Perhitungan kebutuhan pegawai belum dilakukan  a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kinerja yang dihasilkan  b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada seluruh jabatan namun belum sesuai kinerja yang dihasilkan	
d. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan  a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada seluruh unit organisasi b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada sebagian besar unit organisasi c. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada sebagian kecil unit organisasi d. Perhitungan kebutuhan pegawai belum dilakukan a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kinerja yang dihasilkan b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada seluruh jabatan namun belum sesuai kinerja yang dihasilkan c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja hanya dilakukan kepada sebagian jabatan	
d. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan  a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada seluruh unit organisasi  b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada sebagian besar unit organisasi  c. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada sebagian kecil unit organisasi  d. Perhitungan kebutuhan pegawai belum dilakukan  a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kinerja yang dihasilkan  b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada seluruh jabatan namun belum sesuai kinerja yang dihasilkan  c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja hanya dilakukan kepada sebagian jabatan  d. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan	
d. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada seluruh unit organisasi b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada sebagian besar unit organisasi c. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada sebagian kecil unit organisasi d. Perhitungan kebutuhan pegawai belum dilakukan a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kinerja yang dihasilkan b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada seluruh jabatan namun belum sesuai kinerja yang dihasilkan c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja hanya dilakukan kepada sebagian jabatan d. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan organisasi	
d. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada seluruh unit organisasi b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada sebagian besar unit organisasi c. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada sebagian kecil unit organisasi d. Perhitungan kebutuhan pegawai belum dilakukan a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kinerja yang dihasilkan b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada seluruh jabatan namun belum sesuai kinerja yang dihasilkan c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja hanya dilakukan kepada sebagian jabatan d. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan organisasi b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan namun belum sesuai kebutuhan organisasi	
d. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada seluruh unit organisasi b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada sebagian besar unit organisasi c. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada sebagian kecil unit organisasi d. Perhitungan kebutuhan pegawai belum dilakukan a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kinerja yang dihasilkan b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada seluruh jabatan namun belum sesuai kinerja yang dihasilkan c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja hanya dilakukan kepada sebagian jabatan d. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan organisasi	
d. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada seluruh unit organisasi b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada sebagian besar unit organisasi c. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada sebagian kecil unit organisasi d. Perhitungan kebutuhan pegawai belum dilakukan a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kinerja yang dihasilkan b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada seluruh jabatan namun belum sesuai kinerja yang dihasilkan c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja hanya dilakukan kepada sebagian jabatan d. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan organisasi b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan namun belum sesuai kebutuhan organisasi	
d. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada seluruh unit organisasi b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada sebagian besar unit organisasi c. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada sebagian kecil unit organisasi d. Perhitungan kebutuhan pegawai belum dilakukan a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kinerja yang dihasilkan b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada seluruh jabatan namun belum sesuai kinerja yang dihasilkan c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja hanya dilakukan kepada sebagian jabatan d. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan organisasi b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan namun belum sesuai kebutuhan organisasi	0.50
d. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada seluruh unit organisasi b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada sebagian besar unit organisasi c. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada sebagian kecil unit organisasi d. Perhitungan kebutuhan pegawai belum dilakukan a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kinerja yang dihasilkan b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada seluruh jabatan namun belum sesuai kinerja yang dihasilkan c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja hanya dilakukan kepada sebagian jabatan d. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan organisasi b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan namun belum sesuai kebutuhan organisasi	0.50
d. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan  a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada seluruh unit organisasi b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada sebagian besar unit organisasi c. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada sebagian kecil unit organisasi d. Perhitungan kebutuhan pegawai belum dilakukan a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kinerja yang dihasilkan b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada seluruh jabatan namun belum sesuai kinerja yang dihasilkan c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja hanya dilakukan kepada sebagian jabatan d. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan organisasi b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan namun belum sesuai kebutuhan organisasi c. Perhitungan kebutuhan pegawai belum dilakukan	0.50
d. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan  a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada seluruh unit organisasi b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada sebagian besar unit organisasi c. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada sebagian kecil unit organisasi d. Perhitungan kebutuhan pegawai belum dilakukan a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kinerja yang dihasilkan b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada seluruh jabatan namun belum sesuai kinerja yang dihasilkan c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja hanya dilakukan kepada sebagian jabatan d. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan organisasi b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan namun belum sesuai kebutuhan organisasi c. Perhitungan kebutuhan pegawai belum dilakukan	0.50

a. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada seluruh pegawai sesuai dengan	
rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi	
b. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian besar pegawai sesuai	
dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi	
c. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian kecil pegawai sesuai	
dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi	
d. Belum ada pengembangan pegawai berbasis kompetensi	
	1.00
a. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruh pegawai	
b. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian besar pegawai	
c. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian kecil pegawai	
d. Belum ada penerapan penetapan kinerja individu yang telah dilakukan	
a. Seluruh pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja	
organisasi	
b. Sebagian besar pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja	
organisasi	
c. Sebagian kecil pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja	
organisasi	
d. Belum ada pegawai yang melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja	
organisasi	
a. Seluruh pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja	
individu diatasnya	
b. Sebagian besar pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator	
kinerja individu diatasnya	
c. Sebagian kecil pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator	
kinerja individu diatasnya	
d.Seluruh pegawai belum memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja	
individu diatasnya	
a. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan	
b. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan	
c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran	
d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan	
e. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan	
a. telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara berkala	
b. telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara tidak berkala	
c. Belum ada monev pencapaian kinerja individu	
a. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward and punishment	
lainnya terhadap seluruh pegawai	
b. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward and punishment	
lainnya terhadap sebagian besar pegawai	
c. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward and punishment	
lainnya terhadap sebagian kecil pegawai	
d. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pemberian reward and punishment	
lainnya terhadap seluruh pegawai	
	0.50

a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada seluruh unit	
organisasi b. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada sebagian besar	
unit organisasi	
c. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada sebagian kecil	
unit organisasi	
d. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi belum diimplementasikan kepada seluruh unit	
organisasi	
a. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi secara berkala b. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi tidak berkala	
c. Belum ada monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi	
belain and money also pelanoundan also pm, node early node permana motano	
	0.50
a. Unit kerja telah mengimplementasikan SKJ pada seluruh jabatan sesuai kebutuhan unit kerja	
b. Unit kerja mengimplementasikan SKJ pada seluruh jabatan sesuai kebijakan pusat	
c. Unit kerja hanya mengimplementasikan SKJ pada sebagian jabatan	
d. SKJ belum diimplementasi	
a. Evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan berdasarkan SKJ dan telah	
memberikan dampak pengembangan SDM	
b. Evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan berdasarkan SKJ namun belum memberikan dampak pengembangan SDM	
c. Evaluasi jabatan hanya dilaksanakan pada sebagian jabatan berdasarkan SKJ	
d. Evaluasi Jabatan dilaksanakan belum berdasarkan SKJ	
a. Evaluasi sabatan anaksanakan berani beraasarkan sik	
e. Evaluasi Jabatan belum dilaksanakan	
	0.50
	0.50
e. Evaluasi Jabatan belum dilaksanakan	0.50
e. Evaluasi Jabatan belum dilaksanakan	0.50
e. Evaluasi Jabatan belum dilaksanakan	1.00
e. Evaluasi Jabatan belum dilaksanakan  Ya, apabila pegawai dapat mengakses sistem informasi kepegawaian  a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra	
e. Evaluasi Jabatan belum dilaksanakan  Ya, apabila pegawai dapat mengakses sistem informasi kepegawaian  a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra	
e. Evaluasi Jabatan belum dilaksanakan  Ya, apabila pegawai dapat mengakses sistem informasi kepegawaian  a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra c. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra	
e. Evaluasi Jabatan belum dilaksanakan  Ya, apabila pegawai dapat mengakses sistem informasi kepegawaian  a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra c. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra d. Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra	
e. Evaluasi Jabatan belum dilaksanakan  Ya, apabila pegawai dapat mengakses sistem informasi kepegawaian  a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra c. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra d. Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja	
e. Evaluasi Jabatan belum dilaksanakan  Ya, apabila pegawai dapat mengakses sistem informasi kepegawaian  a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra c. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra d. Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja	
e. Evaluasi Jabatan belum dilaksanakan  Ya, apabila pegawai dapat mengakses sistem informasi kepegawaian  a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra c. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra d. Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja c. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja	
e. Evaluasi Jabatan belum dilaksanakan  Ya, apabila pegawai dapat mengakses sistem informasi kepegawaian  a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra c. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra d. Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja	
e. Evaluasi Jabatan belum dilaksanakan  Ya, apabila pegawai dapat mengakses sistem informasi kepegawaian  a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra c. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra d. Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja c. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja d. Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja	
e. Evaluasi Jabatan belum dilaksanakan  Ya, apabila pegawai dapat mengakses sistem informasi kepegawaian  a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra c. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra d. Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja c. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja d. Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja d. Seluruh pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala b. Sebagian besar pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala c. Sebagian kecil pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	
e. Evaluasi Jabatan belum dilaksanakan  Ya, apabila pegawai dapat mengakses sistem informasi kepegawaian  a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra c. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra d. Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja c. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja d. Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja a. Seluruh pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala b. Sebagian besar pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala c. Sebagian kecil pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala d. Seluruh pimpinan belum memantau pencapaian kinerja secara berkala	
e. Evaluasi Jabatan belum dilaksanakan  Ya, apabila pegawai dapat mengakses sistem informasi kepegawaian  a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra c. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra d. Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja c. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja d. Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja d. Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja a. Seluruh pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala b. Sebagian besar pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala c. Sebagian kecil pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala d. Seluruh pimpinan belum memantau pencapaian kinerja secara berkala a. Pimpinan unit kerja memahami kinerja serta strategi pencapaiannya dalam jangka menengah	
e. Evaluasi Jabatan belum dilaksanakan  Ya, apabila pegawai dapat mengakses sistem informasi kepegawaian  a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra c. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra d. Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja c. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja d. Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja d. Seluruh pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala b. Sebagian besar pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala c. Sebagian kecil pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala d. Seluruh pimpinan belum memantau pencapaian kinerja secara berkala a. Pimpinan unit kerja memahami kinerja serta strategi pencapaiannya dalam jangka menengah b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung dalam setiap proses penyusunan dan atau revisi	
e. Evaluasi Jabatan belum dilaksanakan  Ya, apabila pegawai dapat mengakses sistem informasi kepegawaian  a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra c. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra d. Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja c. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja d. Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja d. Seluruh pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala b. Sebagian besar pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala c. Sebagian kecil pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala d. Seluruh pimpinan belum memantau pencapaian kinerja secara berkala a. Pimpinan unit kerja memahami kinerja serta strategi pencapaiannya dalam jangka menengah b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung dalam setiap proses penyusunan dan atau revisi dokumen perencanaan jangka menengah	
e. Evaluasi Jabatan belum dilaksanakan  Ya, apabila pegawai dapat mengakses sistem informasi kepegawaian  a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra c. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra d. Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja c. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja d. Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja a. Seluruh pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala b. Sebagian besar pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala c. Sebagian kecil pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala d. Seluruh pimpinan belum memantau pencapaian kinerja secara berkala a. Pimpinan unit kerja memahami kinerja serta strategi pencapaiannya dalam jangka menengah b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung dalam setiap proses penyusunan dan atau revisi	

a Dimeninan unit karia mamahami kinaria yang barus diagnai satian tahun	
a. Pimpinan unit kerja memahami kinerja yang harus dicapai setiap tahun	
b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung dalam setiap proses penyusunan dan atau revisi	
dokumen perencanaan kinerja tahunan	
c. Pimpinan unit kerja menandatangani dokumen perencanaan kinerja tahunan	
d. Dokumen perencanaan kinerja tahunan tidak ada	
a. Pimpinan unit kerja menindaklanjuti hasil pemantauan rencana aksi secara berkala	
b. Pimpinan unit kerja memantau pencapaian rencana aksi secara berkala	
c.Pimpinan unit kerja menyusun rencana aksi pencapaian kinerja secara berkala	
d. Pimpinan unit kerja tidak membuat rencana aksi pencapaian kinerja	
	2.00
a Columb unit arganisasi barupaya maningkatkan kanasitas CDM yang manangani akuntahilitas	
a. Seluruh unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas	
kinerja	
b. Sebagian besar unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani	
akuntabilitas kinerja	
c. Sebagian kecil unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani	
akuntabilitas kinerja	
d. Seluruh unit organisasi belum berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani	
akuntabilitas kinerja	
a. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara bulanan	
b. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara triwulanan	
c. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara semesteran	
d. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara tahunan	
e. Pemutakhiran data kinerja belum dilakukan	
e. i ematakinan data kinerja seram anakakan	
a. Unit kerja telah memanfaatkan secara optimal Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik	
sesuai dengan kebutuhan	
b. Unit kerja telah memanfaatkan secara optimal Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik	
loggie alteration of the groups	1
yang disediakan oleh pusat	
c. Unit kerja belum memanfaatkan Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik	
c. Unit kerja belum memanfaatkan Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik	
c. Unit kerja belum memanfaatkan Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik	0.75
c. Unit kerja belum memanfaatkan Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik d. Unit kerja tidak melakukan pengukuran kinerja	0.75
c. Unit kerja belum memanfaatkan Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik d. Unit kerja tidak melakukan pengukuran kinerja  a. Public campaign telah dilakukan secara berkala	0.75
c. Unit kerja belum memanfaatkan Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik d. Unit kerja tidak melakukan pengukuran kinerja  a. Public campaign telah dilakukan secara berkala b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala	0.75
c. Unit kerja belum memanfaatkan Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik d. Unit kerja tidak melakukan pengukuran kinerja  a. Public campaign telah dilakukan secara berkala b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala c. Belum dilakukan public campaign	0.75
c. Unit kerja belum memanfaatkan Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik d. Unit kerja tidak melakukan pengukuran kinerja  a. Public campaign telah dilakukan secara berkala b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala c. Belum dilakukan public campaign Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktik gratifikasi	0.75
c. Unit kerja belum memanfaatkan Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik d. Unit kerja tidak melakukan pengukuran kinerja  a. Public campaign telah dilakukan secara berkala b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala c. Belum dilakukan public campaign	0.75
c. Unit kerja belum memanfaatkan Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik d. Unit kerja tidak melakukan pengukuran kinerja  a. Public campaign telah dilakukan secara berkala b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala c. Belum dilakukan public campaign Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktik gratifikasi Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	0.75
c. Unit kerja belum memanfaatkan Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik d. Unit kerja tidak melakukan pengukuran kinerja  a. Public campaign telah dilakukan secara berkala b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala c. Belum dilakukan public campaign Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktik gratifikasi	0.75
c. Unit kerja belum memanfaatkan Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik d. Unit kerja tidak melakukan pengukuran kinerja  a. Public campaign telah dilakukan secara berkala b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala c. Belum dilakukan public campaign Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktik gratifikasi Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut	0.75
c. Unit kerja belum memanfaatkan Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik d. Unit kerja tidak melakukan pengukuran kinerja  a. Public campaign telah dilakukan secara berkala b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala c. Belum dilakukan public campaign Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktik gratifikasi Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:	0.75
c. Unit kerja belum memanfaatkan Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik d. Unit kerja tidak melakukan pengukuran kinerja  a. Public campaign telah dilakukan secara berkala b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala c. Belum dilakukan public campaign Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktik gratifikasi Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut  Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999	0.75
c. Unit kerja belum memanfaatkan Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik d. Unit kerja tidak melakukan pengukuran kinerja  a. Public campaign telah dilakukan secara berkala b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala c. Belum dilakukan public campaign Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktik gratifikasi Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut  Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002	0.75
c. Unit kerja belum memanfaatkan Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik d. Unit kerja tidak melakukan pengukuran kinerja  a. Public campaign telah dilakukan secara berkala b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala c. Belum dilakukan public campaign Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktik gratifikasi Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut  Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015	0.75
c. Unit kerja belum memanfaatkan Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik d. Unit kerja tidak melakukan pengukuran kinerja  a. Public campaign telah dilakukan secara berkala b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala c. Belum dilakukan public campaign Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktik gratifikasi Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut  Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016	0.75
c. Unit kerja belum memanfaatkan Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik d. Unit kerja tidak melakukan pengukuran kinerja  a. Public campaign telah dilakukan secara berkala b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala c. Belum dilakukan public campaign Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktik gratifikasi Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi  Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut  Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016 5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004	0.75
c. Unit kerja belum memanfaatkan Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik d. Unit kerja tidak melakukan pengukuran kinerja  a. Public campaign telah dilakukan secara berkala b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala c. Belum dilakukan public campaign Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktik gratifikasi Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut  Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016	0.75
c. Unit kerja belum memanfaatkan Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik d. Unit kerja tidak melakukan pengukuran kinerja  a. Public campaign telah dilakukan secara berkala b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala c. Belum dilakukan public campaign Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktik gratifikasi Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi  Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut  Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016 5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004	0.75
c. Unit kerja belum memanfaatkan Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik d. Unit kerja tidak melakukan pengukuran kinerja  a. Public campaign telah dilakukan secara berkala b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala c. Belum dilakukan public campaign Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktik gratifikasi Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi  Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut  Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016 5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004	0.75
c. Unit kerja belum memanfaatkan Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik d. Unit kerja tidak melakukan pengukuran kinerja  a. Public campaign telah dilakukan secara berkala b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala c. Belum dilakukan public campaign Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktik gratifikasi Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi  Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut  Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016 5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004	0.75
c. Unit kerja belum memanfaatkan Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik d. Unit kerja tidak melakukan pengukuran kinerja  a. Public campaign telah dilakukan secara berkala b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala c. Belum dilakukan public campaign Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktik gratifikasi Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi  Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut  Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016 5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004	0.75
c. Unit kerja belum memanfaatkan Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik d. Unit kerja tidak melakukan pengukuran kinerja  a. Public campaign telah dilakukan secara berkala b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala c. Belum dilakukan public campaign Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktik gratifikasi Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut  Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016 5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 6. SE MenPANRB No. SE/03/M.PAN/01/2005	0.75
c. Unit kerja belum memanfaatkan Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik d. Unit kerja tidak melakukan pengukuran kinerja  a. Public campaign telah dilakukan secara berkala b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala c. Belum dilakukan public campaign Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktik gratifikasi Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016 5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 6. SE MenPANRB No. SE/03/M.PAN/01/2005	0.75
c. Unit kerja belum memanfaatkan Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik d. Unit kerja tidak melakukan pengukuran kinerja  a. Public campaign telah dilakukan secara berkala b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala c. Belum dilakukan public campaign Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktik gratifikasi Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut  Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016 5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 6. SE MenPANRB No. SE/03/M.PAN/01/2005  Penyampaian LHKASN diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999	0.75

4. SE IVICHTANNO INU. I TAHUH ZUIS	
	0.75
a. Seluruh organisasi telah membangun lingkungan pengendalian	
b. Sebagian organisasi telah membangun lingkungan pengendalian	
c. Seluruh organisasi belum membangunan lingkungan pengendalian	
c. Seluruh diganisasi belum membangunan inigkungan pengendahan	
a. Seluruh organisasi telah melaksanakan penilaian risiko	
b. Sebagian besar organisasi telah melaksanakan penilaian risiko	
c. Sebagian kecil organisasi telah melaksanakan penilaian risiko	
d. Seluruh organisasi belum melaksanakan penilaian risiko	
a. Seluruh organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	
b. Sebagian besar organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko	
yang telah diidentifikasi	
c. Sebagian kecil organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko	
yang telah diidentifikasi	
d. Seluruh organisasi belum melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang	
telah diidentifikasi	
a. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	
b. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian besar pihak terkait	
c. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian kecil pihak terkait	
d. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi dan komunikasi mengenai SPI	
a. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi secara berkala	
b. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala	
c. Belum ada monitoring dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern	
a. Monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala serta memberikan perbaikan dalam	
penerapan SPI	
b. Monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala namun belum memberikan perbaikan	
dalam penerapan SPI	
c. Monitoring dan evaluasi dilakukan belum secara berkala	
d. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPI	
	1.00
a. Seluruh unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat	
b. Sebagian besar unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat	
c. Sebagian kecil unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan masyrakat	
d. Seluruh unit organisasi belum mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat	
a. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti	
b. Sebagian besar Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti	
c. Sebagian kecil Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti	
d. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat belum ditindaklanjuti	
Penilaian ini menghitung realisasi penanganan pengaduan masyarakat yang harus diselesaikan	
	I

a. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala	
b. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Penanganan pengaduan masyarakat belum di monitoring dan evaluasi	
Ya, apabila terdapat laporan hasil evaluasi atas tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat	
	0.75
a. WBS telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai di unit kerja	0.73
b. WBS hanya disosialisasikan kepada sebagian pegawai di unit kerja	
c. WBS belum disosialisasikan	
	0.75
a. Penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan ke seluruh unit organisasi	
b. Penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan ke sebagian besar unit organisasi	i
c. Penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan ke sebagian kecil unit organisasi	i
d. Penanganan Benturan Kepentingan belum disosialiasikan ke seluruh unit organisasi	
Ya, apabila Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	
a. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi secara berkala	
b. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala	
c. Penanganan Benturan Kepentingan belum di monitoring dan evaluasi	
a. Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	
b. Sebagian besar Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	i
c. Sebagian kecil Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	
d. Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan belum ditindaklanjuti	
	1.25
a. Pembangunan zona integritas dilakukan secara intensif	
b. Pembangunan zona integritas dilakikan tidak secara intensif	
c. Belum ada pembangunan zona integritas	
	0.50
Ya, apabila telah terdapat kebijakan standar pelayanan yang mencakup kejelasan biaya, waktu,	
persyaratan perijinan	
a. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada seluruh jenis pelayanan	
ja. Standar perayanan teran diniakidinatkan pada seluruh jenis pelayahan	
h Standar nelayanan telah dimaklumatkan nada sehagian hesar ionis nelayanan	
b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada sebagian besar jenis pelayanan	
b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada sebagian besar jenis pelayanan c. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada sebagian kecil jenis pelayanan d. Standar pelayanan belum dimaklumatkan pada seluruh jenis pelayanan	

a. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada seluruh jenis pelayanan	
b. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada sebagian besar jenis pelayanan	
c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada sebagian kecil jenis pelayanan	
d. Belum terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	
a. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan secara berkala dan dilakukan dengan	
melibatkan stakeholders	
b.Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan secara tidak berkala dan/atau tidak	
dengan melibatkan stakeholders	
c. Belum dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	
a. Dilakukan reviu dan perbaikan SOP secara berkala	
b. Dilakukan reviu dan SOP secara tidak berkala	
c. Belum ada reviu dan perbaikan SOP	
	0.50
a. Seluruh sosilisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima	
b. Sebagian besar sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan	
prima	
c. Sebagian kecil sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan	
prima	
d. Seluruh sosilisasi/pelatihan belum dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima	
a. Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman,	
website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb)	
l ·	
b. Informasi pelayanan dapat diakses melalui beberapa media (misal: papan pengumuman,	
selebaran, dsb)	
c. Informasi pelayanan sulit diakses melalui berbagai media	
a. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi	
kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan	
b. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi	
kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar ada namun belum diimplementasikan	
c. Belum terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi	
kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	
a. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu	
b. Apabila sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu	
c. Apabila sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara terpadu	
d. Apabila tidak ada pelayanan yang dilakukan secara terpadu	
Ya, apabila terdapat bukti inovasi pelayanan yang diciptakan dan bermanfaat bagi penerima	
pelayanan	
	1.50
Ya, apabila telah ditetapkan media pengaduan pelayanan secara jelas dan terbuka	
a. Terdapat SOP pengaduan pelayanan secara komprehensif	
b. Terdapat SOP pengaduan pelayanan namun belum seluruhnya	
c. Belum ada SOP pengaduan pelayanan	
ya, apabila telah ditetapkan unit pengelola pengaduan	

a. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas	
pelayanan	
b. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar pengaduan pelayanan untuk perbaikan	
kualitas pelayanan	
c. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil pengaduan pelayanan unutk perbaikan kualitas	
pelayanan	
d. Belum dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas	
pelayanan	
a. Evaluasi atas penanganan keluhan / masukan dilakukan secara berkala	
b. Evaluasi atas penanganan keluhan / masukan dilakukan tidak berkala	
c. Belum ada evaluasi penanganan keluhan / masukan	
and a state of perturbation of the state of	
	1.50
a. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara berkala	
b. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tidak berkala	
c. Belum ada survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	
Ya, apabila tersedia media untuk mengakses data hasil survey dengan mudah	
a pablia tersedia media untuk mengakses data hasii survey dengan mudah	
a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat	
b. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survey kepuasan masyarakat	
c. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survey kepuasan masyarakat	
d. Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat	
	0.50
Ya, apabila ada rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan	
a. Seluruh pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	
b. Sebagian besar pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	
c. Sebagian kecil pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	
d. Seluruh pelayanan belum menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	
a. Perbaikan dilakukan secara terus-menerus	
b. Perbaikan dilakukan tidak secara terus menerus	
c. Belum dilakukan perbaikan	
e. Beruiii anakakuii perbuikuii	

## Unit

Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%
		2.50	50.00%
		0.50	100.00%
A/B/C	А	1	
A/B/C/D	А	1	
A/B/C/D	А	1	
		0.50	100.00%
Ya/Tidak	Ya	1	
A/B/C/D	А	1	

	Catatan/Keterangan/ Penjelasan
Tim Re SDPPI	formasi birokrasi telah disusun di tingkat Ditjen
1. SK D	oukung : Dirjen SDPPI Nomor 66/DIRJEN/2019 tanggal 6 Bri 2019 tentang Tim Reformasi Birokrasi di Brigan SDPPI tahun 2019.
	dilaksanakan rapat pembahasan program kerja, na aksi RB, dan usulan Quick Wins Ditjen SDPPI 2019.
1. Und aksi RE 2019.	oukung: angan rapat pembahasan program kerja, rencar B, dan usulan Quick Wins Ditjen SDPPI tahun oran rapat pembahasan.
Telah ( kerja S	disusun road map/rencana kerja reformasi unit DPPI.
	ukung : oran rapat pembahasan rencana aksi RB
	dilaksanakan rapat pembahasan rencana
	m kerja Reformasi Birokrasi Ditjen SDPPI tahun

A/B/C	А	1		
		1.00	100.00%	
A/B/C/D	А	1		
A/B/C/D	А	1		
A/B/C/D	А	1		
A/B/C/D	А	1		
		0.50	100.00%	
A/B/C/D	А	1		
A/B/C/D	А	1		
		1.25	25.00%	
		1.25	100.00%	

	an unit kerja melaporkan Reformasi Birokrasi SDPPI kepad Sekjen Kominfo.
	ukung: a Dinas Dirjen SDPPI Nomor 125/DJSDPPI.1/OT.
	03/2019 tanggal 11 Maret 2019 perihal Tim
Reforn	nasi Birokrasi, Zona Integritas dan Quick Wins
Tahun	2019.
Telah ( SDPPI	dibentuk agen perubahan di lingkungan Ditjen
	uikung ·
Data D	UNUITE .
Data D	gen Perubahan

A/B/C	А	1		Sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika perlu diatur kembali tata cara permohonan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi.  Data Dukung:  1. SK Kepala BBPPT Nomor: 1673/P/BBPPT.31/VIII/TAHUN 2018 tentang Petunjuk Teknis Tatacara Pengujian Alat Dan Perangkat Telekomunikasi.
A/B/C	А	1		
		1.50	25.00%	
		1.50	100.00%	
A/B/C	А	1		
Ya/Tidak	Ya	1		
		2.00	40.00%	
		0.625	100.00%	
A/B/C/D	А	1		Terdapat proses bisnis yang telah dijabarkan dalam SOP.  Data Dukung: 1. SOP Ditjen SDPPI
A/B/C/D	А	1		
A/B/C/D	А	1		Telah dilakukan monev atas SOP Ditjen SDPPI.  Data Dukung: 1. Laporan rapat monev SOP
		0.75	100.00%	

A/B/C/D	А	1	
A/B/C/D	А	1	
		0.625	100.00%
A/B/C/D	А	1	
A/B/C	A	1	
		3.50	23.33%
		0.50	100.00%
A/B/C/D	А	1	
A/B/C/D	А	1	
A/B/C/D	А	1	
A/B/C	А	1	
		0.50	100.00%
A/B/C/D	А	1	

Pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui website SDPPI: postel.go.id Data Dukung: 1. Capture web SDPPI Implementasi pengembangan e-government secara integrasi melalui website SDPPI: postel.go.id Data Dukung: 1. Capture web SDPPI (pengajuan e-licensing). Informasi publik dapat diakses melalui website SDPPI : postel.go.id

A/B/C/D	А	1	
		1.00	100.00%
A/B/C/D	А	1	
		0.50	100.00%

Data Duku	ЗРРТ уа		

A/B/C/D	А	1		
A/B/C	А	1		
		0.50	100.00%	
A/B/C/D	А	1		
A/B/C/D/E	A	1		
		0.50	100.00%	
Ya/Tidak	Ya	1		Da 1. ole
		3.00	50.00%	
		1.00	100.00%	
A/B/C/D	А	1		
A/B/C/D	А	1		
A/B/C/D	А	1		
A/B/C/D	А	1		

Data Dukung :
Data Dukung :
Data Dukung:  1. Capture aplikasi kepegawaian yang dapat diakses
1. Capture aplikasi kepegawaian yang dapat diakses
1. Capture aplikasi kepegawaian yang dapat diakses
Data Dukung:  1. Capture aplikasi kepegawaian yang dapat diakses oleh setiap pegawai
1. Capture aplikasi kepegawaian yang dapat diakses
1. Capture aplikasi kepegawaian yang dapat diakses
1. Capture aplikasi kepegawaian yang dapat diakses
1. Capture aplikasi kepegawaian yang dapat diakses
1. Capture aplikasi kepegawaian yang dapat diakses
1. Capture aplikasi kepegawaian yang dapat diakses
1. Capture aplikasi kepegawaian yang dapat diakses
1. Capture aplikasi kepegawaian yang dapat diakses
1. Capture aplikasi kepegawaian yang dapat diakses
1. Capture aplikasi kepegawaian yang dapat diakses
1. Capture aplikasi kepegawaian yang dapat diakses
1. Capture aplikasi kepegawaian yang dapat diakses
1. Capture aplikasi kepegawaian yang dapat diakses
1. Capture aplikasi kepegawaian yang dapat diakses
1. Capture aplikasi kepegawaian yang dapat diakses
1. Capture aplikasi kepegawaian yang dapat diakses
1. Capture aplikasi kepegawaian yang dapat diakses
1. Capture aplikasi kepegawaian yang dapat diakses
1. Capture aplikasi kepegawaian yang dapat diakses
1. Capture aplikasi kepegawaian yang dapat diakses
1. Capture aplikasi kepegawaian yang dapat diakses
1. Capture aplikasi kepegawaian yang dapat diakses
1. Capture aplikasi kepegawaian yang dapat diakses
1. Capture aplikasi kepegawaian yang dapat diakses
1. Capture aplikasi kepegawaian yang dapat diakses
1. Capture aplikasi kepegawaian yang dapat diakses
1. Capture aplikasi kepegawaian yang dapat diakses
1. Capture aplikasi kepegawaian yang dapat diakses
1. Capture aplikasi kepegawaian yang dapat diakses
1. Capture aplikasi kepegawaian yang dapat diakses
1. Capture aplikasi kepegawaian yang dapat diakses
1. Capture aplikasi kepegawaian yang dapat diakses
1. Capture aplikasi kepegawaian yang dapat diakses
1. Capture aplikasi kepegawaian yang dapat diakses
1. Capture aplikasi kepegawaian yang dapat diakses

A/B/C/D	А	1	
A/B/C/D	А	1	
		2.00	100.00%
A/B/C/D	А	1	
A/B/C/D	А	1	
A/B/C/D	А	1	
		5.25	43.75%
		0.75	100.00%
A/B/C	А	1	
Ya/Tidak	Ya	1	
Ya/Tidak	Ya	1	
Ya/Tidak	Ya	1	
%	100.00%	1.00	
Jumlah	200.00		
Jumlah	100		
Jumlah	100		
Jumlah	200		
%	100.00%	1.00	
Jumlah	160		
Jumlah	20		

	ikung : ih Bimtek SAK ngan Bimtek !		<b>(IP</b>		
Pemuta	khiran data ki	inerja dilaki	ukan seca	ra bulana	n.
Data Du 1. Unda	ikung : ngan rapat M	onev Capai	an Kinerja	a setiap b	ulan
Data Du 1. Capt	ikung : ure web e-kind	erja SDPPI			
		erja SDPPI			
		erja SDPPI			
		erja SDPPI			
		erja SDPPI			
		erja SDPPI			
		erja SDPPI			
		erja SDPPI			

Jumlah	40		1
Jumian Jumlah	100		
Jumlah	160		
Julilian	100	0.75	100.00%
A/B/C	A	1	
A/B/C	А	1	
A/B/C	A	1	
A/B/C	А	1	
A/B/C	А	1	
A/B/C/D	А	1	
		1.00	100.00%
A/B/C/D	А	1	
A/B/C/D	А	1	
%	100.00%	1.00	
Jumlah	1		
Jumlah	0		
Jumlah	1		

Telah dibangun lingkungan pengendalian yang ditetapkan oleh SK Drjen.	
Data Dukung : 1. SK Dirjen SDPPI Nomor 128/DIRJEN/2017 tenta Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP di Lingkunga	_
Ditjen SDPPI	
Telah dilakukan sosialisasi SPIP di lingkungan Ditjo SDPPI.	en
Data Dukung :	
Undangan Sosialisasi SPIP     Foto Sosialisasi SPIP	
Data Dukung :	
1. Nota Dinas Penunjukan nama responden untul	<
wawancara dan pengisian kuesioner lanjutan	•
Data Dukung : 1. Undangan Rapat Peningkatan Penilaian SPIP SE thn 2018	)PPI

A/B/C	A	1	
Ya/Tidak	Ya	1	
		0.75	100.00%
A/B/C	А	1	
		0.75	100.00%
A/B/C/D	А	1	
Ya/Tidak	Ya	1	
A/B/C	А	1	
A/B/C/D	А	1	
		1.25	100.00%
A/B/C	А	1	
		4.50	75.00%
		0.50	100.00%
Ya/Tidak	Ya	1	
A/B/C/D	А	1	

Data Dukung :
1. Undangan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi,
Penanganan Dumas, WBS & Benturan Kepentingan
Data Dukung:
Undangan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi,
Penanganan Dumas, WBS & Benturan Kepentingan
Data Dukung :
Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan di
Ditjen SDPPI.
•
Penetapan Zona Integritas di lingkungan Ditjen SDPPI.
Data Dukung:
1. Nota Dinas Dirjen SDPPI Nomor 125/DJSDPPI.1/OT.
01.02/03/2019 tanggal 11 Maret 2019 perihal Tim
Reformasi Birokrasi, Zona Integritas dan Quick Wins
Tahun 2019.
2. Surat Nomor B.766/DJSDPPI.1/OT.03.02/04/2019
tanggal 8 April 2019 perihal Rapat dan Sosialisasi ZI
menuju WBK dan WBBK.
3. Laporan Hasil Reviu Pembangunan Zona Integritas
Direktorat Operasi Sumber Daya — Ditjen SDPPI.
Dokumen Pendukung :
1. SK Kepala BBPPT Nomor 1675/BBPPT/ VIII/ 2018
Tanggal 14 Agustus 2018 tentang Standar Pelayanan
Pengujian Perangkat Telekomunikasi
2. SK Direktur Operasi Sumber Daya Nomor 6205.A
tahun 2015 tentang Penetapan visi, misi, moto,
maklumat, etika pelayanan, hak dan kewajiban,
penghargaan dan hukuman, kompensasi serta standar
pelayanan di Direktorat Operasi Sumber Daya.
Dokumen Pendukung :
Maklumat pelayanan BBPPT

				<u></u>
A/B/C/D	А	1		Dokumen Per 1. SOP Penguj 2. SOP percep 3. SOP Pelaya
A/B/C	А	1		Dokumen Per 1. Lap Pelaksa SDPPI. 2. Laporan ev 9001.2015.
A/B/C	А	1		Dokumen Per 1. Review SOF 2. Review SOF
		0.50	100.00%	
A/B/C/D	А	1		Bukti Dukung 1. Jadwal IHT 2. Surat Tugas
A/B/C	А	1		Bukti Dukung 1. Capture we
A/B/C	А	1		Bukti Dukung 1. Piagam Pet
A/B/C/D	А	1		Bukti Dukung 1. Foto-foto S
Ya/Tidak	Ya	1		SDPPI berpart Publik yang di Data Dukung 1. Nota Dinas
		1.50	100.00%	
Ya/Tidak	Ya	1		Bukti Dukung 1. Foto-foto S
A/B/C	А	1		Data Dukung 1. SOP Pusat F
Ya/Tidak	Ya	1		Contact Cente

# ndukung: ıjian Perangkat Telekomunikasi patan perizinan penyiaran anan SDPPI ndukung: anaan Pusat Pelayanan Terpadu Ditjen valusi proses perizinan berdasarkan ISO ndukung: P Ditstand P Dittan 3: s Pelatihan Customer Service BBPPT eb SDPPI tugas Loket Terbaik Sarana Layanan Terpadu (SDPPI) tisipasi pada Kompetisi Inovasi Pelayanan liselenggarakan oleh Kementerian PANRB. keikutsertaan SDPPI pada KIPP Sarana Layanan Terpadu (SDPPI) Pelayanan Terpadu SDPPI er Sarana Pusat Pelayanan Terpadu SDPPI ara Merdeka Lt. 11

A/B/C/D	А	1	
A/B/C	А	1	
		1.50	100.00%
A/B/C	А	1	
Ya/Tidak	Ya	1	
A/B/C/D	А	1	
		0.50	100.00%
Ya/Tidak	Ya	1	
A/B/C/D	А	1	
A/B/C	А	1	
		23.50	

Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar pengaduan pelayanan.

#### Data Dukung:

- 1. Laporan Kegiatan Surveillance Audit ISO TA 2018
- 2. Tindak Lanjut Pengaduan SDPPI

Telah dilakukan evaluasi penanganan keluhan/masukan secara berkala di SDPPI.

### Data Dukung:

- 1. Laporan evaluasi proses perizinan
- 2. Risalah rapat monev peningkatan Pusat Pelayanan Terpadu SDPPI

#### Data Dukung:

- 1. Laporan Akhir Survei SDPPI Tahun 2018
- 2. Laporan Akhir Survey Persepsi Korupsi SDPPI

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dapat diakses di website SDPPI (www.postel.go.id)

#### Data Dukung:

1. Capture web SDPPI perihal Laporan Akhir Survei SDPPI

#### Data Dukung:

- 1. Laporan Progress Persiapan Maritim On The Spot
- 2. Risalah rapat OSS-ISR

#### Data Dukung:

1. Penerapan One-Day Service OSS

#### Data Dukung:

1. Undangan Design Review Meeting (Peningkatan dan Penyesuaian Modul-modul SIMS).

	חחח
SIJPP	ושפוו

SDPPI
-------